

IMPLEMENTASI PROGRAM SATU DESA SATU PAUD DI KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH (studi Kasus di Desa Parumahan dan Samhurang)

Lia Puspitasari¹, Muhamad Arsyad², Nida Urahmah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Email : liapuspitasari789@gmail.com

ABSTRAK

Program Satu Desa Satu PAUD merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memperluas akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Satu Desa Satu PAUD di Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan studi kasus di Desa Parumahan dan Desa Samhurang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan ditentukan secara purposive, meliputi pemerintah desa, pengelola PAUD, tenaga pendidik, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan di kedua desa, namun dengan karakteristik pelaksanaan yang berbeda. Di Desa Samhurang, pelaksanaan program didukung oleh ketersediaan bangunan PAUD, jumlah peserta didik, serta keterlibatan masyarakat. Sementara itu, di Desa Parumahan pelaksanaan program berlangsung dengan keterbatasan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan kerangka implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, pelaksanaan program dipengaruhi oleh tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, koordinasi antar organisasi, komunikasi kebijakan, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Kata kunci: implementasi kebijakan, PAUD, satu desa satu PAUD, pendidikan anak usia dini, kebijakan publik

ABSTRACT

The One Village One Early Childhood Education (PAUD) Program is a government policy aimed at expanding access to early childhood education services at the village level. This study aims to describe the implementation of the One Village One PAUD Program in Labuan Amas Utara Subdistrict, Hulu Sungai Tengah Regency, using case studies in Parumahan and Samhurang Villages. The research employed a qualitative descriptive approach. Informants were selected through purposive sampling, including village officials, PAUD administrators, teachers, and community members. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman model. The findings indicate that the program has been implemented in both villages, although with different implementation characteristics. In Samhurang Village, program implementation is supported by the availability of PAUD facilities, a stable number of students, and community involvement. Meanwhile, in Parumahan Village, implementation is characterized by limited facilities, a shortage of teachers, and lower levels of community participation. Based on the Van Meter and Van Horn policy implementation framework, program implementation is influenced by policy objectives, availability of resources, inter-organizational coordination, policy communication, and social, economic, and political environmental conditions.

Keywords: policy implementation, early childhood education, one village one PAUD, public policy

PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan tahap fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia karena berlangsung pada masa golden age, yaitu usia 0–6 tahun. Pada fase ini, perkembangan kognitif, fisik, sosial-emosional, moral, dan bahasa anak berkembang secara pesat dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan serta layanan pendidikan yang diterima. Oleh karena itu, penyediaan layanan PAUD yang berkualitas menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas generasi masa depan.

Meskipun demikian, akses terhadap layanan PAUD di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan, khususnya antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sejumlah desa, terutama di wilayah terpencil, belum memiliki satuan PAUD yang memadai, sehingga anak usia dini menghadapi hambatan dalam memperoleh layanan pendidikan awal. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan kesiapan anak saat memasuki jenjang pendidikan dasar.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menginisiasi Program Satu Desa Satu PAUD yang bertujuan menjamin ketersediaan minimal satu layanan PAUD di setiap desa. Program ini diperkuat oleh berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 yang menegaskan peran pemerintah daerah dan desa dalam penyediaan layanan PAUD.

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kebijakan ini diperkuat melalui Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Di Kecamatan Labuan Amas Utara, masih terdapat sejumlah desa yang belum memiliki satuan PAUD, sementara desa yang telah memiliki PAUD menghadapi keterbatasan sarana, tenaga pendidik, dan dukungan regulasi desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Satu Desa Satu PAUD di Kecamatan Labuan Amas Utara dengan studi kasus di Desa Parumahan dan Desa Samhurang. Kedua desa ini dipilih untuk menggambarkan dinamika implementasi program di tingkat desa serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini didukung oleh sejumlah penelitian terdahulu yang relevan sebagai rujukan konseptual dan empiris, khususnya terkait implementasi kebijakan dan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Penelitian-penelitian tersebut menjadi bahan perbandingan untuk melihat persamaan, perbedaan, serta celah penelitian yang dikaji dalam studi ini.

Asmirotun Nadwa (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi Suku Anak Dalam (SAD) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi” mengkaji pelaksanaan program PAUD pada komunitas adat terpencil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun telah melaksanakan program PAUD bagi Suku Anak Dalam dengan cukup baik, meskipun masih menghadapi berbagai hambatan. Kendala utama yang ditemukan meliputi rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini, kondisi lingkungan yang kurang kondusif, serta belum optimalnya perencanaan kegiatan yang secara khusus dirancang untuk program PAUD bagi Suku Anak Dalam. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor sosial budaya dan lingkungan menjadi tantangan signifikan dalam implementasi program PAUD (Nadwa, 2023).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Herma Yulianti (2023) berjudul “Implementasi Program Bunda PAUD di TK Islam Mujahidin Pangkalan Bun Kalimantan Tengah” berfokus pada

peran program Bunda PAUD dalam mewujudkan PAUD Holistik Integratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Bunda PAUD di TK Islam Mujahidin dilaksanakan melalui enam bentuk program utama, antara lain peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, promosi konsumsi makanan sehat dan bergizi, sosialisasi bahaya makanan ber-MSG, penguatan PAUD Holistik Integratif, harmonisasi kegiatan Bunda PAUD, serta pembinaan dan pengawasan layanan PAUD. Implementasi program dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, yang masing-masing memiliki komponen dan indikator yang jelas (Yulianti, 2023).

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi program PAUD sangat dipengaruhi oleh faktor perencanaan, dukungan pemangku kepentingan, kondisi sosial budaya masyarakat, serta ketersediaan sumber daya. Namun demikian, penelitian terdahulu lebih banyak menyoroati implementasi program PAUD pada kelompok atau satuan tertentu, sementara kajian mengenai implementasi Program Satu Desa Satu PAUD secara spesifik pada tingkat desa, khususnya dalam konteks pemerataan akses dan peran pemerintah desa, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi penting untuk mengisi celah tersebut melalui studi kasus di Desa Parumahan dan Desa Samhurang, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Secara esensi, implementasi adalah fase realisasi dari sebuah kebijakan atau rencana yang telah disepakati demi mewujudkan sasaran spesifik. Proses eksekusi ini mensyaratkan adanya perencanaan yang telah dirancang secara matang serta memiliki legalitas atau pengesahan resmi sebelum dijalankan. Ripley dan Franklin (dalam Mani La, 2020:92) mendefinisikan implementasi sebagai rangkaian aktivitas yang terjadi setelah suatu kebijakan atau undang-undang ditetapkan, yang mencakup penyediaan program, manfaat, maupun keluaran nyata (*tangible output*) (La Mani, 2020).

Dalam perspektif kebijakan publik, implementasi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif, tetapi juga sebagai proses yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, serta interaksi sosial. George C. Edwards III menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini saling berkaitan dan menentukan sejauh mana kebijakan dapat diterjemahkan secara efektif ke dalam tindakan nyata di lapangan.

Secara praktis, implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan keputusan dasar yang mencakup tahapan pengesahan regulasi, pelaksanaan oleh instansi pelaksana, penerimaan oleh kelompok sasaran, hingga munculnya dampak kebijakan baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Dengan demikian, implementasi merupakan tahapan krusial yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik.

Kebijakan publik pada dasarnya adalah intervensi pemerintah untuk menyelesaikan masalah bersama. Mengutip Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan atau justru tidak dikerjakan. Dengan demikian, kebijakan tidak selalu berupa aksi nyata, melainkan juga mencakup keputusan pemerintah untuk tidak mengambil langkah apa pun terhadap suatu fenomena. Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan, menekankan bahwa kebijakan publik harus memuat tujuan, nilai, dan praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik selalu berorientasi pada kepentingan umum dan bersifat mengikat karena dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (Subarsono, 2020).

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu dalam rangka menyelesaikan masalah publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan publik pada umumnya melalui tiga tahapan utama, yaitu perumusan kebijakan (*policy formulation*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) (Hayat, 2018). Ketiga tahapan ini saling berkaitan dan membentuk satu siklus kebijakan yang berkesinambungan. Riant Nugroho (dalam Hayat, 2018) mengklasifikasikan bentuk kebijakan publik ke dalam tiga bentuk, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kebijakan paternalistik yang tercermin dalam sikap kepemimpinan, serta kebijakan yang tercermin dalam perilaku pemimpin. Ketiga bentuk ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dapat terwujud dalam praktik kepemimpinan dan tindakan nyata penguasa.

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan yang berfungsi menerjemahkan keputusan politik ke dalam tindakan nyata. Wahab (dalam Anggara, 2016:530) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang biasanya berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan eksekutif. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan sering kali bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, dan administratif (Agustino, 2016).

Pada hakikatnya, program adalah kumpulan aktivitas sistematis yang diagendakan untuk mewujudkan target khusus dalam periode yang telah ditetapkan. Sebagaimana dijelaskan Spaulding (dikutip dalam Khaerudin dan Suharto, 2022), program didefinisikan sebagai rangkaian tindakan spesifik yang dikonstruksi guna meraih hasil atau sasaran yang memiliki tolok ukur jelas. Arikunto dan Jabar menegaskan bahwa program merupakan bentuk konkret dari implementasi kebijakan yang bersifat berkelanjutan dan melibatkan berbagai aktor dalam suatu organisasi. Implementasi program merupakan proses pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang agar tujuan program dapat tercapai secara efektif. Menurut Jones, implementasi program adalah bagian integral dari kebijakan publik yang menuntut adanya kejelasan program, kelompok sasaran, serta pelaksana program. Tanpa ketiga unsur tersebut, pelaksanaan program berpotensi tidak mencapai hasil yang diharapkan (Khaerudin and Suharto, 2022).

Program Satu Desa Satu PAUD merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjamin pemerataan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini dengan memastikan setiap desa memiliki minimal satu lembaga PAUD. Program ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan pendidikan yang inklusif dan merata, khususnya bagi masyarakat pedesaan yang selama ini mengalami keterbatasan akses layanan pendidikan anak usia dini. Secara konseptual, PAUD berperan penting dalam pengembangan potensi anak secara holistik. Mulyasa (2009) menekankan bahwa PAUD bertujuan mengembangkan seluruh potensi anak sejak dini agar siap memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Tujuan utama Program Satu Desa Satu PAUD meliputi peningkatan angka partisipasi PAUD, pemerataan akses pendidikan anak usia dini, penguatan peran pemerintah desa, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pengasuhan anak. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfokus pada pendirian lembaga PAUD, tetapi juga pada keberlanjutan dan kualitas penyelenggaraannya di tingkat desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk menggambarkan implementasi Program Satu Desa Satu PAUD di tingkat desa. Lokasi penelitian berada di PAUD Desa Parumahan dan Desa Samhurang, Kecamatan Labuan Amas Utara,

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua desa merepresentasikan variasi kondisi pelaksanaan program, baik dari aspek ketersediaan layanan, dukungan pemerintah desa, maupun tantangan implementasi. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pelaksanaan PAUD, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen kebijakan, laporan desa, arsip PAUD, dan literatur terkait. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria memiliki keterlibatan dan pemahaman terhadap pelaksanaan Program Satu Desa Satu PAUD. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas pembelajaran serta kondisi sarana dan prasarana PAUD. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai proses pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung sekaligus alat triangulasi. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan metode, serta analisis kasus negatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih objektif terhadap temuan penelitian. (Sugiyono, 2020)

PEMBAHASAN

Implementasi Program Satu Desa Satu PAUD Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus di Desa Parumahan dan Samhurang)

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

a. Ukuran Kebijakan

Ukuran kebijakan menunjukkan tingkat ketercapaian sasaran program, efektivitas pelaksanaan di lapangan, pemanfaatan sumber daya, serta manfaat yang dirasakan masyarakat. Kebijakan dinilai berhasil apabila tujuan yang ditetapkan dapat diwujudkan dan menghasilkan perubahan positif.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa implementasi Program Satu Desa Satu PAUD di Kecamatan Labuan Amas Utara telah dilaksanakan di Desa Parumahan dan Samhurang, namun capaian keberhasilannya berbeda. Di Desa Parumahan, ukuran kebijakan belum tercapai secara optimal, ditandai dengan keterbatasan sarana prasarana, rendahnya partisipasi orang tua, serta belum optimalnya pemanfaatan lembaga PAUD. Sebaliknya, di Desa Samhurang pelaksanaan program menunjukkan hasil yang lebih baik, ditunjukkan oleh ketersediaan fasilitas yang relatif memadai, peningkatan jumlah peserta didik, serta dukungan masyarakat dan pemerintah desa.

Secara umum, ukuran kebijakan telah terpenuhi pada tahap pelaksanaan, namun tingkat keberhasilannya lebih menonjol di Desa Samhurang. Temuan ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh kejelasan tujuan dan kemampuan pelaksana dalam merealisasikannya secara kontekstual.

b. Tujuan Kebijakan

Tujuan utama Program Satu Desa Satu PAUD adalah menjamin ketersediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini di setiap desa guna memperluas akses pendidikan yang merata dan mudah dijangkau. Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan akses PAUD, khususnya di desa yang sebelumnya belum memiliki lembaga PAUD, sekaligus mempersiapkan anak usia dini agar lebih siap memasuki jenjang sekolah dasar. Melalui

PAUD, anak diharapkan memperoleh kemampuan dasar akademik, sosial, dan emosional, serta pembentukan karakter sesuai nilai agama dan budaya lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, tujuan kebijakan di Kecamatan Labuan Amas Utara, khususnya di Desa Parumahan dan Samhurang, dinilai telah tercapai secara cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan PAUD di desa, meningkatnya partisipasi anak, serta kemudahan akses bagi masyarakat. Selain itu, kebijakan ini turut meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya PAUD. Temuan ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh kesesuaian tujuan dengan konteks sosial budaya dan kemampuan pelaksana dalam merealisasikannya.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan publik, termasuk pendidikan anak usia dini. Ketersediaan tenaga pendidik yang memadai, kompeten, dan sesuai kebutuhan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya manusia dalam Program Satu Desa Satu PAUD di Kecamatan Labuan Amas Utara telah berjalan, namun belum optimal dan menunjukkan perbedaan antar desa. Di Desa Parumahan, keterbatasan jumlah tenaga pendidik dan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan guru menjadi kendala utama yang berdampak pada proses pembelajaran dan rendahnya partisipasi masyarakat. Sebaliknya, Desa Samhurang memiliki jumlah pendidik yang relatif memadai dan menunjukkan komitmen yang baik dalam peningkatan kompetensi, meskipun kualifikasi pendidikan formal dan sarana pendukung masih terbatas.

Secara keseluruhan, implementasi program dari aspek sumber daya manusia belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan. Temuan ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kecukupan dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat.

b. Anggaran

Anggaran merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena menentukan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan program. Kecukupan dan ketepatan alokasi anggaran berpengaruh langsung terhadap pemenuhan kebutuhan operasional dan pengembangan layanan.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa anggaran Program Satu Desa Satu PAUD di Kecamatan Labuan Amas Utara, khususnya di Desa Parumahan dan Samhurang, masih bergantung pada Dana Desa dengan dukungan terbatas dari Dinas Pendidikan. Di Desa Parumahan, terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah desa dan pihak PAUD terkait kecukupan anggaran, yang tercermin dari masih terbatasnya fasilitas dan sarana pendukung pembelajaran. Sementara itu, di Desa Samhurang, meskipun alokasi anggaran relatif lebih besar, kebutuhan operasional, pembayaran honor guru, dan peningkatan kapasitas pendidik belum sepenuhnya terpenuhi.

Secara keseluruhan, anggaran telah mendukung keberlangsungan program, namun belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan PAUD. Temuan ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menegaskan bahwa kecukupan anggaran merupakan prasyarat penting keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

a. Karakteristik Organisasi Formal

Organisasi formal memegang peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik karena menentukan kejelasan struktur, pembagian tugas, dan koordinasi antar pelaksana. Keberadaan organisasi yang legal dan terstruktur menjadi prasyarat bagi efektivitas pelaksanaan program.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa organisasi formal dalam Program Satu Desa Satu PAUD di Kecamatan Labuan Amas Utara telah terbentuk, namun belum berjalan optimal. Di Desa Parumahan, koordinasi antara pemerintah desa dan pengelola PAUD cukup berjalan, tetapi kelembagaan PAUD belum memiliki legalitas operasional yang jelas, sehingga dukungan administratif dan penguatan organisasi menjadi terbatas. Sebaliknya, di Desa Samhurang, struktur organisasi PAUD relatif lebih tertata, meskipun masih memerlukan pendampingan dalam aspek administrasi dan tata kelola, terutama akibat dinamika pergantian pemerintahan.

Secara keseluruhan, karakteristik organisasi formal telah ada, tetapi masih lemah dalam aspek legalitas dan stabilitas koordinasi. Temuan ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menekankan bahwa struktur organisasi yang jelas dan koordinasi efektif merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan.

b. Karakteristik Organisasi Informal

Organisasi informal dan jaringan sosial memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan berbasis masyarakat, termasuk Program Satu Desa Satu PAUD. Keterlibatan aktor nonpemerintah dapat memperkuat dukungan sosial dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya PAUD.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa peran organisasi informal di Desa Parumahan dan Samhurang tergolong cukup optimal, meskipun belum merata. Dukungan utama berasal dari orang tua peserta didik dan kader posyandu melalui kegiatan gotong royong, pendampingan kegiatan PAUD, serta layanan kesehatan anak. Sebaliknya, keterlibatan PKK, tokoh agama, dan tokoh masyarakat masih terbatas dan bersifat situasional.

Secara keseluruhan, organisasi informal telah berkontribusi terhadap keberlangsungan program, namun belum terorganisasi secara kuat. Peran kader posyandu dan orang tua menjadi faktor pendukung utama, sementara perluasan keterlibatan organisasi masyarakat lainnya masih diperlukan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga ditentukan oleh sinergi antara organisasi formal dan informal.

4. Variabel Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

a. Komitmen pelaksana

Komitmen pelaksana merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Pelaksana yang memiliki pemahaman dan sikap positif terhadap kebijakan akan lebih mampu mendorong pencapaian tujuan program.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa komitmen pelaksana dalam implementasi Program Satu Desa Satu PAUD di Kecamatan Labuan Amas Utara tergolong cukup optimal. Para pelaksana memahami tujuan program, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini serta mendorong partisipasi orang tua dalam menyekolahkan anak ke PAUD. Sikap penerimaan dan dukungan terhadap kebijakan juga terlihat dari rasa tanggung jawab pelaksana dalam menjalankan program.

Namun, implementasi di lapangan belum sepenuhnya optimal karena sebagian pelaksana masih berfokus pada aspek administratif dan belum secara aktif melakukan pembinaan, sosialisasi berkelanjutan, serta penggerakan masyarakat. Kondisi ini berdampak pada masih rendahnya partisipasi dan kesadaran sebagian orang tua.

Temuan ini sejalan dengan indikator disposition dalam teori Van Meter dan Van Horn, yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh dukungan pelaksana, tetapi juga oleh realisasi komitmen tersebut dalam tindakan nyata di lapangan.

b. Penerimaan dari Masyarakat

Penerimaan masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan publik, khususnya pada program berbasis partisipasi seperti Program Satu Desa Satu PAUD. Penerimaan tersebut tercermin dari tingkat kesadaran, partisipasi orang tua, serta dukungan sosial terhadap keberadaan PAUD di desa.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap Program Satu Desa Satu PAUD di Kecamatan Labuan Amas Utara belum sepenuhnya optimal dan berbeda di setiap desa. Di Desa Parumahan, tingkat penerimaan masih rendah, ditandai dengan minimnya partisipasi orang tua, rendahnya kesadaran akan pentingnya PAUD, serta faktor ekonomi yang mendorong orang tua langsung menyekolahkan anak ke SD. Sebaliknya, di Desa Samhurang, penerimaan masyarakat relatif lebih baik, terlihat dari meningkatnya jumlah peserta didik dan keterlibatan orang tua, meskipun partisipasi tersebut belum merata.

Secara umum, masyarakat di kedua desa menerima keberadaan program, namun penerimaan tersebut belum diikuti oleh keterlibatan aktif secara berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa indikator penerimaan masyarakat dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan peran tokoh masyarakat, serta pendekatan partisipatif untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap PAUD.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

a. Koordinasi Antar Organisasi

Koordinasi antar organisasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik karena menentukan kejelasan peran, kelancaran pelaksanaan program, serta efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Dalam Program Satu Desa Satu PAUD, koordinasi melibatkan pemerintah desa, lembaga PAUD, dinas pendidikan, dan organisasi pendukung.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa koordinasi antar organisasi di Desa Parumahan dan Desa Samhurang telah berjalan, namun belum optimal. Koordinasi dan rapat antar lembaga cenderung bersifat insidental, sehingga komunikasi kurang konsisten dan informasi program sering terlambat atau tidak merata. Kondisi ini berdampak pada lemahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat, terutama di Desa Parumahan.

Secara keseluruhan, koordinasi antar organisasi dalam implementasi Program Satu Desa Satu PAUD di Kecamatan Labuan Amas Utara masih lemah, ditandai dengan rendahnya intensitas komunikasi, ketidakjelasan pembagian peran, dan lambatnya pengambilan keputusan. Temuan ini menunjukkan bahwa indikator koordinasi antar organisasi dalam teori Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2016) belum

sepenuhnya terpenuhi, sehingga diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

b. Komunikasi Antar Petugas dengan Masyarakat

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan publik karena menentukan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Dalam Program Satu Desa Satu PAUD, komunikasi berperan dalam menyampaikan tujuan, manfaat, dan mekanisme program kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa komunikasi antara petugas dan masyarakat di Desa Parumahan dan Desa Samhurang belum berjalan optimal. Penyampaian informasi masih bersifat tidak terstruktur dan tidak dilakukan secara rutin, sehingga sebagian masyarakat belum memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai program. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan PAUD.

Secara keseluruhan, implementasi Program Satu Desa Satu PAUD dari aspek komunikasi masih kurang optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa indikator komunikasi dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2016) belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih terencana, intensif, dan partisipatif agar informasi program dapat tersampaikan secara efektif dan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

a. Dukungan Lingkungan Sosial

Dukungan lingkungan sosial berperan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, terutama pada program yang menuntut perubahan perilaku masyarakat seperti Program Satu Desa Satu PAUD. Dukungan tersebut mencakup penerimaan, partisipasi, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat sekitar dalam mendukung layanan PAUD.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa dukungan lingkungan sosial di Desa Parumahan dan Desa Samhurang masih belum optimal. Rendahnya kesadaran sebagian orang tua terhadap pentingnya PAUD berdampak pada minimnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan PAUD. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program belum memperoleh dukungan sosial yang kuat.

Secara keseluruhan, dukungan lingkungan sosial dalam implementasi Program Satu Desa Satu PAUD di Kecamatan Labuan Amas Utara masih lemah. Temuan ini menunjukkan bahwa indikator lingkungan sosial dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2016) belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi dan pelibatan tokoh masyarakat serta tokoh agama untuk meningkatkan dukungan sosial terhadap keberhasilan program.

b. Dukungan Lingkungan Ekonomi

Kondisi lingkungan ekonomi masyarakat merupakan faktor eksternal yang memengaruhi keberhasilan implementasi Program Satu Desa Satu PAUD. Lingkungan ekonomi berkaitan dengan tingkat pendapatan, jenis mata pencaharian, serta kemampuan masyarakat dalam mendukung keberlangsungan pendidikan anak usia dini.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa meskipun PAUD telah disediakan dan relatif terjangkau, kondisi ekonomi masyarakat di Desa Parumahan dan Samhurang tetap memengaruhi tingkat partisipasi. Mayoritas masyarakat bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak menentu, sehingga mengalami keterbatasan dalam

memenuhi kebutuhan pendukung pendidikan, seperti biaya iuran, perlengkapan belajar, dan transportasi. Kondisi tersebut berdampak pada ketidakhadiran anak secara rutin di PAUD.

Secara keseluruhan, dukungan lingkungan ekonomi dalam implementasi Program Satu Desa Satu PAUD belum optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa indikator lingkungan ekonomi dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2016) belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendukung seperti subsidi operasional, bantuan transportasi, serta penguatan peran pemerintah desa guna meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat terhadap layanan PAUD.

c. **Dukungan Lingkungan Politik**

Lingkungan politik merupakan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Program Satu Desa Satu PAUD, terutama dalam memberikan legitimasi, dukungan kebijakan, dan keberlanjutan program. Dukungan politik yang konsisten dapat memperkuat pelaksanaan program di tingkat desa.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa dukungan lingkungan politik di Desa Parumahan dan Samhurang tergolong cukup baik, meskipun belum merata. Di Desa Parumahan, pemerintah desa relatif aktif mendukung program melalui keterlibatan dalam kegiatan PAUD, penyediaan fasilitas, serta koordinasi dengan pengelola. Namun, dukungan tersebut belum diperkuat dengan regulasi desa yang secara khusus mengatur keberlanjutan PAUD. Sementara itu, di Desa Samhurang, dukungan politik cenderung terbatas dan bersifat administratif, sehingga pelaksanaan program lebih bergantung pada inisiatif pengelola PAUD dan dinas terkait.

Secara umum, pemerintah telah menunjukkan dukungan politik melalui alokasi anggaran bagi PAUD, yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas. Kendati demikian, keterbatasan dana dan lemahnya komitmen politik yang berkelanjutan masih menjadi kendala dalam optimalisasi pelaksanaan program.

Dengan demikian, indikator lingkungan politik dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2016) dapat dikatakan terpenuhi secara parsial. Diperlukan penguatan kebijakan desa, peningkatan komitmen politik, serta dukungan lintas aktor yang berkelanjutan agar implementasi Program Satu Desa Satu PAUD dapat berjalan lebih efektif dan berkesinambungan.

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Satu Desa Satu PAUD di Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus di Desa Parumahan dan Samhurang)

1. Faktor Pendorong

Beberapa faktor pendorong yang mendukung pelaksanaan Program Satu Desa Satu PAUD antara lain:

a. **Dukungan Pemerintah Desa**

Dukungan pemerintah desa menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pelaksanaan program. Pemerintah desa berperan dalam menyediakan fasilitas, mengalokasikan dana desa, serta melakukan koordinasi dengan pengelola PAUD. Dukungan ini terutama terlihat dalam penyediaan sarana dasar dan keikutsertaan aparatur desa dalam kegiatan PAUD, yang membantu keberlangsungan program di tingkat lokal.

b. Semangat dan Komitmen Guru PAUD

Faktor lain yang sangat berpengaruh adalah tingginya semangat dan dedikasi guru PAUD dalam menjalankan tugas pengajaran. Meskipun menghadapi keterbatasan sarana, prasarana, dan kompetensi formal yang belum sepenuhnya sesuai standar, para guru tetap menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendidik anak-anak usia dini. Semangat ini menjadi modal utama dalam menjaga keberlangsungan proses pembelajaran di PAUD.

c. Partisipasi Masyarakat di Desa Samhurang

Partisipasi masyarakat, khususnya di Desa Samhurang, tergolong cukup baik. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan PAUD, dukungan kader posyandu, serta partisipasi dalam kegiatan gotong royong menunjukkan adanya penerimaan masyarakat terhadap program. Partisipasi ini membantu memperkuat pelaksanaan program, terutama dalam mendukung kegiatan belajar dan pelayanan dasar bagi anak usia dini.

2. Faktor Penghambat

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang masih menjadi kendala dalam implementasi Program Satu Desa Satu PAUD, yaitu:

a. Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya di Desa Parumahan, menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga tingkat partisipasi dalam menyekolahkan anak ke PAUD masih rendah. Kondisi ini berdampak pada jumlah peserta didik yang belum mencerminkan jumlah anak usia PAUD di desa.

b. Keterbatasan Sarana, Prasarana, dan Tenaga Pendidik

Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti ruang belajar, fasilitas bermain, dan sanitasi, masih menjadi kendala di kedua desa. Selain itu, jumlah tenaga pendidik yang terbatas, khususnya di Desa Parumahan, menyebabkan beban kerja guru menjadi tinggi dan proses pembelajaran belum berjalan secara optimal.

c. Minimnya Regulasi Desa dan Ketidakkonsistenan Pelaksanaan Program

Faktor penghambat lainnya adalah minimnya peraturan desa yang secara khusus mengatur penyelenggaraan PAUD. Tidak adanya regulasi yang jelas dan mengikat menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Program masih sangat bergantung pada kebijakan pemerintah desa yang bersifat situasional, sehingga belum memiliki kepastian jangka panjang.

SIMPULAN

Implementasi Program Satu Desa Satu PAUD di Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah dilaksanakan di Desa Parumahan dan Desa Samhurang dengan karakteristik pelaksanaan yang berbeda. Program ini diarahkan untuk menyediakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini di setiap desa guna memperluas akses pendidikan bagi anak usia dini. Dalam praktiknya, pelaksanaan program di kedua desa menunjukkan variasi dalam ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta tingkat keterlibatan masyarakat.

Di Desa Samhurang, pelaksanaan program didukung oleh ketersediaan bangunan PAUD, jumlah peserta didik yang relatif stabil, serta keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam kegiatan PAUD. Sementara itu, di Desa Parumahan, pelaksanaan program berlangsung dengan kondisi sarana fisik yang terbatas, jumlah tenaga pendidik yang terbatas, serta partisipasi masyarakat yang cenderung lebih rendah. Perbedaan kondisi tersebut memengaruhi dinamika penyelenggaraan layanan PAUD di masing-masing desa.

Berdasarkan kerangka implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, tujuan kebijakan telah dipahami oleh pelaksana program di tingkat desa. Namun, pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh faktor ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran, pola koordinasi antar lembaga, serta mekanisme komunikasi antara pelaksana dan masyarakat. Selain itu, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik turut membentuk respons masyarakat terhadap keberadaan program. Secara umum, Program Satu Desa Satu PAUD berperan dalam menyediakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat desa. Pelaksanaan program menunjukkan bahwa capaian kebijakan dipengaruhi oleh konteks lokal masing-masing desa, termasuk dukungan kelembagaan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan pola interaksi antar aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hayat (2018) *Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, Formulasi*. Malang: Intrans Publishing.
- Khaerudin and Suharto, N.T. (2022) *Evaluasi program dan kebijakan pendidikan*. Pustaka Belajar.
- La Mani (2020) *Implementasi kebijakan publik: Teori dan praktik*. Deepublish.
- Nadwa, A. (2023) *Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bagi Suku Anak Dalam (SAD) Oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi*. Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.
- Subarsono (2020) *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono (2020) *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Yulianti, H. (2023) *Implementasi Program Bunda Paud di TK Islam Mujahidin Pangkalan Bun Kalimantan Tengah*. Universitas Islam Negeri Antasari.